

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KELURAHAN  
HANDIL BAKTI KECAMATAN ALALAK MENURUT PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT”**

Rifansyah<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Maria Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810045

<sup>2</sup>) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB NIDN. 0025087901

<sup>3</sup>) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1116088201

*Email: rifan0665@gmail.com*

**ABSTRAK**

Pedagang kaki lima selalu menjadi bahan kontroversi di berbagai bidang, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Kehadirannya sering dikaitkan dengan masalah tata kelola, sehingga penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan keindahan dan ketertiban di kota. Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari melakukan studi lapangan dan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode analisis yang digunakan untuk pengolahan data dalam penulisan ini adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, hasil penelitian ini tentang Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Desa Handil Bakti Kecamatan Alalak dilakukan sosialisasi pembentukan Masyarakat yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kami melakukan rambu-rambu dan patroli. Setiap hari, pemerintah kota ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan tidak bertindak di pinggir jalan. Sebab, penegakannya berupa tiga teguran lisan atau tertulis, dan jika tetap dilanggar akan mengakibatkan pengusiran dan penyitaan barang. Ini akan dilakukan oleh unit polisi layanan publik yang dilakukan dengan dukungan dari Dishub, TNI dan Polri. Hukum beroperasi sesuai dengan peraturan lokal. Kendala penindakan PKL di Kecamatan Handil Bakti Kecamatan Alalak berdasarkan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 terhadap PKL Kali Lima dikarenakan lemahnya koordinasi dan kendala lainnya, serta minimnya sarana transportasi para pedagang kaki lima. Pihak berwenang karena kekurangan, total ada 3 kendaraan (truk, mobil Kijang dan mobil Hilux), namun salah satunya yaitu mobil Kijang sering mogok sehingga tidak memungkinkan untuk mengoperasikan ketiga angkutan tersebut.

*Kata Kunci: Penegakan hukum, penertiban, dan pedagang kaki lima.*

---

**ABSTRACT**

*Street vendors have always been a polemic in various circles, both among the community and among the government. Its existence is often related to control issues, so law enforcement is very necessary in order to create beauty and order in the city, law enforcement is an effort to create peace and tranquility in the community.*

*This research includes empirical research. The data collection used by the researcher is to conduct field studies, interviews with resource persons to obtain the required data, the analytical technique used in processing the data in this paper uses qualitative analysis techniques.*

*The results of this study regarding law enforcement against street vendors in the Handil Bakti Village, Alalak District based on the Barito Kuala Regency regional regulation Number 6 of 2019 concerning Public Order and Community Peace carried out by civil service police units who have carried out socialization, installed billboards, and carried out patrols. every working day, it is intended that the community is orderly and does not trade on the shoulder of the road because enforcement has been carried out in the form of verbal or written warnings three times and then if they still violate, forced evictions and confiscation of goods are carried out by the civil service police unit assisted by the Transportation Agency, TNI, Polri so that enforcement is carried out. The law operates in accordance with the Regional Regulation. Obstacles in law enforcement against street vendors in the Handil bakti sub-district, Alalak sub-district based on the Barito Kuala Regency regional regulation Number 6 of 2019 concerning Public Order and Community Peace, against Kali lima traders due to weak coordination and other obstacles, the lack of transportation equipment from the officers, totaling three cars, namely (trucks, Kijang cars and Hilux cars), not all of these three transportations can be operated because one of them is very old, namely the Kijang car which breaks down very often.*

*Keywords: Law enforcement, control, and street vendors.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ishaq, (2017), *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, Bandung; Cet. I. cv. Alfabeta, anggota IKAP.
- J. R. Raco, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. I. Jakarta: PT. Gasindo, Anggota IKAP.
- Liau, Gasper, (2015), *Administrasi Pembangunan (Studi Kajian PKL)*, Cet. I. Bandung: PT. Rafika Adititama.
- Resta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.
- Soekanto, Soerjono, (2019), *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. I. Depok: Perpustakaan Nasional.
- Sunggono, Bambang, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. Depok: Raja Wali Pers.

### Jurnal

- Azhar, Muhammd, Benuf Komelius, (2020), “Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi : I Juni 2020.
- Goesniadhie S, Kusnu, (2010), “Prespektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”, *Jurnal Hukum*, No.2 Vol. Edisi : April 2010.
- Kasim, H.Muhammad, (2019), “Perda Sebagai Bagian Hukum di Indonesia”, *Pleno De Jure*, Volume 8 nomor 1, Edisi: Juni 2019.
- Purwanti Henny dan Misnarti, (2010), “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Argumentum*, Vo. 10, No. 1, Desember 2010.
- Ramadhan Adam, (2015), “Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”, *UNNES Law Journal*, 2015.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filasafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Utomo Hadi, Sugeng, Dkk, “Kebijakan publik dan dampaknya terhadap pedagang kaki lima (PKL)”, *Jurnal Transaksi*, vol 11, No. 1 ISSN 1979-990X, tahun 2019.
- Wafirotin, Zulfa Khusnatul, (2015), “Persepsi Keuntungan Pedagang kaki lima di jalan baru ponorogo”, *jurnal ekulinrium*, No. 2 Vol 13, Edisi : Maret 2015.

### Peraturan Undang-Undang

- Norma atau kaedah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094).
- Peraturan Undang-Undang, Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## **Webset**

[Hhttp://ejournal.atmajaya.ac.id](http://ejournal.atmajaya.ac.id), diakses pada Kamis, 10 Februari 2022.

<https://business-law.binus.ac.id>, diakses pada Jumat, 17 Juni 2022.

<https://dukcapil.baritokualakab.gp.id>, diakses pada Selasa, 15 Februari 2022.